

TRANSFORMASI KONFLIK DALAM MASYARAKAT SIMEULUE (Studi Kasus Program Lawatan di Kecamatan Alafan)

Oleh: Bambang Sumario¹, Afrizal Tjoetra² dan Yeni Sri Lestari³

^{1,2,3} Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, Aceh Barat
Email: bambangsumario0109@gmail.com

Abstrak

Interaksi yang berlangsung dalam maupun antar masyarakat diharapkan untuk meningkatkan soliditas masyarakat. Pada sisi yang lain, interaksi yang terjadi merupakan salah satu penyebab wujudnya konflik dalam masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari peristiwa konflik antar masyarakat di Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue berkaitan dengan pelaksanaan program lawatan. Idealnya, program lawatan melalui kunjungan antar masyarakat yang dilaksanakan secara turun temurun menjadi wadah silaturahmi serta keharmonisan antar masyarakat dan gampong. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik penentuan informan secara *purposive sampling*. Penggalan data dilaksanakan melalui wawancara kepada 8 orang informan dan kajian dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat masih mendukung pelaksanaan program lawatan. Hal ini dibuktikan dengan masih berlangsungnya program tersebut walau sudah diterbitkan larangan melalui surat edaran Bupati Kabupaten Simeulue pada tahun 2018. Mengenai penyebab konflik yang terjadi antar masyarakat karena belum adanya ketentuan yang dapat menjadi rujukan bersama dalam pelaksanaan kegiatan olah raga dan kesenian. Sedangkan mengenai transformasi konflik dilakukan dengan membangun ketentuan bersama antar aparat gampong dan masyarakat, terutama dalam pelaksanaan kegiatan olah raga dan kesenian.

Kata Kunci: Interaksi, Konflik, Masyarakat, Program Lawatan.

PENDAHULUAN

Interaksi yang berlangsung dalam maupun antar masyarakat diharapkan untuk meningkatkan soliditas masyarakat. Pada sisi yang lain, interaksi yang terjadi merupakan salah satu penyebab wujudnya konflik dalam masyarakat. Dengan demikian, konflik merupakan suatu peristiwa yang sering terjadi dalam masyarakat dengan berbagai penyebabnya.

Menurut para ahli konflik dan perdamaian bahwa potensi konflik bermula saat terjadinya interaksi antar individu dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan (Fisher & dkk, 2000) bahwa konflik terjadi karena hubungan antara 2 (dua) pihak atau lebih, baik pada individu maupun kelompok yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang sama maupun berbeda yang dianggap tidak sejalan. Selanjutnya, (Lederach, 2003) menyatakan bahwa konflik merupakan kondisi normal dalam hubungan manusia dan dapat sebagai motor perubahan. Apalagi, berdasarkan (Tjoetra, 2016), memaknai konflik sebagai situasi yang lazim dalam kehidupan manusia.

Sebagaimana (Susan, 2010) menyatakan bahwa konflik dapat terjadi pada 4 (empat) skala yang berbeda, yaitu konflik antara individu (*interpersonal conflict*), konflik antara kelompok (*intergroup conflict*), konflik antara kelompok dengan negara (*vertical*

conflict), dan konflik antara negara (*inter-state conflict*). Setiap skala memiliki latar belakang dan arah perkembangannya. Jika dikelola secara arif dan bijaksana, konflik akan membangun proses sosial dan bersifat membangun bagi perubahan sosial masyarakat dan tidak terjadinya kekerasan.

Selain itu, beberapa potensi konflik tercipta karena berbagai aktivitas dalam masyarakat. Padahal, aktivitas tersebut bertujuan untuk membina keakraban atau wadah silaturahmi antar masyarakat. Hal ini dapat merujuk (Susan, 2009) yang mendefinisikan bahwa konflik merupakan pertentangan antara satu sama lain yang ditandai oleh pergerakan dari beberapa kelompok sehingga hal ini terjadi sebuah persinggungan.

Dengan demikian, diperlukan pemahaman tentang transformasi konflik. Transformasi konflik dapat dimaknai sebagai upaya mengurangi kekerasan dan meningkatkan keadilan dalam masyarakat. Hal ini bersesuaian dengan (Lederach, 2003), yang menyatakan bahwa transformasi konflik dimaknai sebagai peluang untuk merespon pasang surutnya konflik sosial guna mewujudkan proses perubahan konstruktif dengan meningkatkan keadilan dalam interaksi langsung dan struktur sosial, dan merespon berbagai masalah kehidupan dalam masyarakat.

Selain itu, (Anggoro, 2009) menyatakan bahwa pembangunan perdamaian (*peace building*) dimaknai sebagai proses untuk membawa perubahan menuju konsolidasi perdamaian (*peace consolidation*) yang antara lain tercermin dari berbagai keadaan yang menunjukkan berfungsinya kembali otoritas pemerintahan bersama dengan institusi khusus yang dibentuk untuk memberi pelayanan khusus.

Berikutnya, studi (Bank, 2006) dan (Anggoro, 2009) telah memetakan empat aliran yang sering digunakan untuk membangun perdamaian. Pertama, aliran pengelolaan konflik (*conflict management*) yang mengutamakan upaya untuk mencari beragam penyelesaian melalui jalur politik (diplomasi) untuk mengakhiri konflik. Kedua, aliran penyelesaian konflik (*conflict resolution*) yang memberikan perhatian besar untuk menjawab tantangan ganda: menghilangkan akan-akar pertikaian seraya memperbaiki hubungan yang porak poranda antar pihak yang dalam waktu lama terjerumus dalam pertikaian.

Sedangkan aliran ketiga yaitu transformasi konflik (*conflict transformation*) yang secara konsep diupayakan untuk menjangkau bukan hanya aktor yang terlibat konflik, tetapi juga ruang dimana mereka berada. Transformasi diharapkan akan memulai terbentuknya masyarakat baru yang tidak lagi membawa beban masa lalu, namun memiliki koherensi keinginan untuk memintal masa depan dan mendasarkan hubungan sosial baru seirama dengan perjalanan transformasi itu sendiri. Sebagai langkah awal yang diyakini mampu membawa perubahan dilakukan dengan rekonsiliasi dalam masyarakat. Selanjutnya, aliran keempat yaitu aliran komplementer, pengikut aliran ini tidak secara kaku mengutamakan dimensi tertentu, fisik atau non fisik, tetapi pada kecenderungan mengidentifikasi bagaimana dan kapan konflik dapat diselesaikan melalui negosiasi langsung antar pihak-pihak yang bersengketa atau harus menghadirkan pihak ketiga.

Kajian tentang konflik yang berlaku dalam masyarakat antara lain dilakukan oleh (Yusnidar, 2016), (Bariah, 2018), dan (Masyitah, 2018). Penelitian Yusnidar (2016) dengan judul “*Konflik Sosial Rawa Tripa di Gampong Tripa Bawah Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya*” menguraikan 3 (tiga) penyebab terjadinya konflik antara masyarakat dengan PT. Fajar Baizuri di Gampong Tripa Bawah Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya, yaitu adanya klaim perusahaan terhadap tanah masyarakat gampong, adanya pembagian hasil jual tanah masyarakat oleh aparat Gampong Tripa Bawah yang tidak rata, serta adanya proses pembelian tanah masyarakat dengan harga yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Gampong Tripa Bawah. Berikutnya, hasil penelitian Bariah (2018) dengan judul “*Fenomena Konflik Politik di Gampong Suak Keumudei Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat. Meulaboh*” diketahui penyebab terjadinya konflik karena ketidakpercayaan masyarakat kepada Keuchik (kepala desa) karena tidak berlaku adil dalam pemilihan aparat gampong. Proses ini berdampak hingga pada masyarakat gampong yang terpecah belah atau tidak bersatu lagi. Konflik yang berlangsung di Gampong Suak Keumudei merupakan konflik horizontal yang berlangsung antar masyarakat di Gampong Suak Keumudei.

Sedangkan hasil penelitian Masyitah (2018) dengan judul “*Resolusi Konflik Oleh Lembaga Sosial (Tuba Pent) di Gampong Meunasa Krueng Kecamatan Beutung Kabupaten Nagan Raya*” menggambarkan tentang penyebab konflik yang terjadi di kalangan masyarakat Gampong Meunasah Krueng Kecamatan Beutung Kabupaten Nagan Raya karena sejumlah hal-hal sederhana, seperti perbedaan pendapat, perkelahian anak, kecemburuan sosial, sengketa tanah, dan perbedaan pendapat pandangan politik di kalangan masyarakat.

Perbedaan dengan 3 (tiga) penelitian di atas, antara lain berkaitan dengan fokusnya. Jika penelitian Yusnidar (2016) menggambarkan tentang konflik masyarakat dengan perusahaan, Bariah (2018) berkaitan dengan konflik politik, sedangkan Masyitah (2018) mengenai konflik masyarakat dengan aparat gampong. Sedangkan fokus penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan program lawatan yang dilaksanakan sebagai sarana silaturahmi serta keharmonisan antar masyarakat. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan ketiganya karena berkaitan dengan peristiwa konflik yang berlangsung dalam masyarakat.

Teori transformasi konflik Lederach (2003) dipandang sesuai untuk mendalami kondisi yang berlangsung dalam masyarakat di Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue, terutama dalam pelaksanaan program lawatan.

Program lawatan merupakan sebuah tradisi yang dilaksanakan secara turun temurun, dengan tujuan meningkatkan silaturahmi serta keharmonisan antar gampong (penyebutan untuk desa/kampung di Aceh). Rangkaian acara dalam program ini terdiri dari silaturahmi antar masyarakat, diikuti dengan olahraga seperti bola kakidan bolavolly yang diadakan oleh organisasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dan organisasi kepemudaan yang ada di dalam gampong. Selain itu, juga diisi dengan rangkaian acara kesenian pada malam harinya melalui acara hiburan berupa

tarian persembahan, lagu-lagu tradisional, dan nandong. Acara ini juga berupa kegiatan yang dianggap formal, karena didalamnya juga melibatkan tamu-tamu undangan, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan aparaturnya setempat.

Peristiwa konflik antar masyarakat kerap terjadi selama program lawatan, walaupun tujuan program lawatan ini sebagai sarana untuk mewujudkan soliditas antar masyarakat. Mengingat konflik terus berulang, sehingga Pemerintah Kabupaten Simeulue menghimbau untuk menghentikan pelaksanaan program lawatan. Proses pemberitahuan penghentian program tersebut dilakukan oleh Camat di Kabupaten Simeulue untuk disampaikan kepada setiap gampong.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui mengapa masyarakat masih melaksanakan program lawatan padahal Pemerintah Kabupaten Simeulue sudah menerbitkan surat edarannya untuk menghentikannya serta hendak mengetahui transformasi konflik yang dapat dilakukan untuk mewujudkan soliditas antar masyarakat secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*. Penggalan data diperoleh melalui wawancara kepada 8 orang informan dan kajian dokumentasi (Moleong, 2011). Informan penelitian ini terdiri dari (1) Bupati Kabupaten Simeulue, (2) Camat Kecamatan Alafan, (3) Ketua Pemuda Gampong Lubuk Baik Kecamatan Alafan, (4) 4 (empat) orang masyarakat Gampong Lubuk Baik Kecamatan Alafan, dan (5) 1 (satu) orang masyarakat Gampong Langi Kecamatan Alafan.

Data penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Berdasarkan (Martono, 2015) dinyatakan bahwa data primer adalah sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama (informan melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh bukan dari sumber utama. Data sekunder diperoleh melalui penelitian-penelitian terdahulu atau data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

PEMBAHASAN

Uraian dalam pembahasan mengacu pada dua hal, yakni menjawab tujuan penelitian tentang alasan masyarakat masih melaksanakan program lawatan dan transformasi konflik untuk mewujudkan soliditas masyarakat secara berkelanjutan melalui silaturahmi dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat.

Mengapa Program Lawatan?

Program lawatan merupakan aktivitas masyarakat yang sudah berlangsung lama. Berdasarkan informan dinyatakan bahwa program lawatan sudah menjadi tradisi yang mulai dilaksanakan pada tahun 1970. Program ini pada dasarnya mengandung syiar agama dalam bentuk kegiatan ceramah agama atau tausiah, bersifat menghubungkan silaturahmi antara individu, keluarga dan organisasi masyarakat.

Mengingat, pada masa awal dicetusnya program lawatan, jarak tempuh, akses komunikasi dan transportasi untuk saling berkunjung antar gampong yang ada dalam Kecamatan Alafan sangat terbatas. Uraian ini sesuai dengan hasil wawancara pada informan terpilih, terdiri dari Bupati Kabupaten Simeulue, Camat Kecamatan Alafan, Ketua Pemuda Gampong Lubuk Baik Kecamatan Alafan, 4 (empat) orang masyarakat Gampong Lubuk Baik Kecamatan Alafan, dan seorang masyarakat Gampong Langi Kecamatan Alafan serta dokumentasi terkait pelaksanaan program lawatan.

Seiring perkembangan zaman, rangkaian kegiatan dalam program lawatan mengalami peningkatan. Selain agenda yang bersifat keagamaan, juga diikuti dengan berbagai kegiatan olah raga dan kesenian. Contoh kegiatan olah raga antar pemuda dan acara resepsi malam (lebih dikenal dengan malam gembira) yang diisi dengan hiburan. Kedua kegiatan ini ditujukan untuk mempererat hubungan dan saling mengenalkan kreativitas masyarakat. Hanya saja, dalam pelaksanaannya tak terhindarkan jika terjadi persinggungan antar penonton selama kegiatan olah raga dan hiburan. Sehingga, sejumlah informan berpendapat bahwa program lawatan ini memiliki 2 (dua) sudut pandang yang berbeda, yaitu dapat bermakna positif dengan manfaat silaturahmi dan keakraban antar masyarakat serta menimbulkan kondisi negatif karena gesekan antar masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, secara umum program lawatan masih berlangsung dalam masyarakat di Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue. Program lawatan pada dasarnya dibuat sesuai dengan ketentuan dan disepakati atas dasar musyawarah, baik dalam menentukan jumlah gampong serta tata tertib dalam melaksanakannya. Selain itu, pelaksanaan program lawatan juga harus diketahui oleh Kepala Mukim dan Muspika Kecamatan setempat seperti Camat, Kapolsek, dan Koramil.

Transformasi Konflik untuk Membangun Soliditas Masyarakat

Pembahasan dalam bagian ini diawali dengan uraian tentang pemicu konflik dalam masyarakat. Seterusnya, dikaitkan dengan transformasi konflik untuk membangun soliditas dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemicu konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat dibagi dalam dua bagian, pertama jelang pelaksanaan dan kedua saat pelaksanaan program lawatan.

Pemicu pertama berawal dari percekocokkan dalam masyarakat yang akan melaksanakan program lawatan. Hal ini disebabkan pelaksanaan program lawatan bersamaan dengan kegiatan pertanian masyarakat, seperti pada saat turun sawah. Sehingga hanya sebagian masyarakat yang aktif dalam mempersiapkan segala tahapan kegiatan dan rangkaian selama proses penerimaan tamu lawatan. Mengingat, sifat program lawatan jika sudah pernah berkunjung ke gampong lain maka wajib menerima kunjungan balasan dari gampong yang bersangkutan tanpa kecuali. Dampaknya, sebagian masyarakat mengucilkan masyarakat yang tidak berperan aktif selama persiapan dan pelaksanaan program lawatan.

Sedangkan bagian kedua berlangsung selama kegiatan olah raga dan kesenian yang berlangsung pasca resepsi malam. Pada kegiatan olah raga berawal dari sikap yang tidak sportif antar pendukung selama kegiatan olah raga. Selain saling sindir, bahkan terjadi saling pukul antar pendukung. Sehingga, kondisi ini tanpa disengaja mengundang amarah penonton lainnya dalam perkelahian untuk mendukung tim masing-masing yang akhirnya melibatkan masyarakat antar gampong.

Selanjutnya pada bagian rangkaian acara resepsi malam (malam gembira) yang diselenggarakan oleh gampong penerima tamu. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pementasan seni, baik dari kalangan gampong sebagai penerima tamu maupun dari peserta program lawatan. Peserta yang hadir saat pementasan seni terdiri dari warga gampong penerima tamu, peserta program lawatan, maupun masyarakat lainnya yang berada di seputar gampong. Sehingga, banyaknya pengunjung yang menonton acara dari berbagai kalangan juga menjadi pemicu konflik dalam masyarakat. Hal ini lebih disebabkan perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma dan bahkan mabuk-mabukan yang tanpa akhirnya berujung perkelahian sehingga mengundang keributan dari para penonton atau masyarakat gampong.

Berikut uraian aktor dan perilaku konflik yang terjadi dalam pelaksanaan program lawatan:

Tabel 1. Pelaku dan Perilaku Konflik

No	Pelaku Konflik	Perilaku Konflik	Pelaksana Tindakan
1	Masyarakat gampong sebagai pelaku/ penyelenggara	- Menghakimi orang yang melakukan perbuatan melanggar norma sehingga mengundang tawuran antar gampong	- Pemuda gampong dan aparat Perlindungan Masyarakat (LINMAS) setempat
2	Masyarakat gampong lain/tamu	- Tertangkap oleh pemuda, LINMAS, penonton (gampong lain) bagi yang melakukan pelanggaran norma (asusila). - Penonton mabuk-mabukan atau membuat kegaduhan saat acara kesenian (malam gembira).	- Masyarakat gampong asli - Masyarakat luar gampong
3	Penonton	- Tawuran antar gampong	- Masyarakat asli gampong - Masyarakat gampong lain - Penonton

4	Lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> - Menyinggung perasaan orang lain (percekcokkan) - Melempari penonton dan tamu lawatan - Mengambil pecah belah bukan haknya setelah makan bersama tamu lawatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemuda/i atau pelajar dari gampong, gampong lain, maupun penonton
---	-----------	--	---

Sumber: Diolah dari berbagai sumber berdasarkan hasil penelitian, 2019.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui sejumlah pelaku dan indikator penyebab konflik dan masalah sosial yang menimbulkan kekerasan dalam program lawatan di Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue. Sehingga, program lawatan dilarang oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk dilaksanakan melalui Surat Edaran Bupati Simeulue Nomor 050/1006/2018. Namun, sesuai wawancara dengan informan diketahui bahwa masyarakat masih saja melaksanakan program lawatan dengan alasan sebagai sarana mempererat silaturahmi dan keharmonisan dalam masyarakat.

Jika merujuk transformasi konflik Lederach (2003), maka diperlukan pemahaman bersama untuk membangun perubahan. Perubahan dimaksud merujuk 4 (empat) dimensi yakni dimensi personal, dimensi hubungan, struktur dan budaya. Jika merujuk pada pelaksanaan program lawatan maka 4 (empat) dimensi tersebut sangat berperan karena seluruh dimensi tersebut saling berkaitan. Apalagi pelaksanaan program lawatan dapat berlangsung karena upaya bersama antar aparat gampong dan masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Simeulue juga berperan melalui pembinaan dan pengawasan melalui jajarannya hingga gampong.

Transformasi yang dilakukan berkenaan dengan perubahan cara pandang dan perilaku para pihak terhadap program lawatan. Program lawatan dijadikan sebagai sarana konsolidasi dan sinergi antar masyarakat. Aparatur dan masyarakat gampong harus menyadari bahwa berbagai kegiatan yang dilaksanakan selama program lawatan bertujuan untuk membina silaturahmi dan keharmonisan antar masyarakat gampong. Dengan demikian, transformasi yang dilakukan dengan membangun kesepakatan bersama antar aparat gampong dan masyarakat untuk membentuk ketentuan agar terhindar konflik selama dan pasca program lawatan. Berikutnya, aparat gampong dan masyarakat, secara khusus mengatur pelaksanaan kegiatan olah raga dan pementasan kesenian sebagai bagian dari agenda respsi malam. Termasuk pula, jika diperlukan untuk membuat pengaturan mengenai sanksi yang patut ketika ada yang melanggar.

Atau pun, jika masih juga terjadi sejumlah pertentangan selama program lawatan, patut pula dipertimbangkan untuk menghapus rangkaian kegiatan (kembali pada kegiatan utama program lawatan) guna mengantisipasi terjadinya konflik dan masalah sosial. Harapannya, tujuan pelaksanaan program lawatan untuk membangun interaksi dan membina soliditas antar masyarakat di Kecamatan Alafan Kabupaten

Simeulue dapat terwujud. Pada akhirnya, terbina masyarakat yang solid untuk membawa perubahan pada masa yang akan datang.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, diperoleh jawaban kedua tujuan penelitian ini bahwa: pertama masyarakat masih melaksanakan program lawatan sebagai sarana memperkuat silaturahmi antar gampong. Hal ini dibuktikan dengan masih berlangsungnya program lawatan walau sudah diterbitkan larangan melalui surat edaran Bupati Kabupaten Simeulue. Mengenai penyebab konflik yang terjadi antar masyarakat karena belum adanya ketentuan yang dapat menjadi rujukan bersama dalam pelaksanaan kegiatan olah raga dan kesenian.

Sedangkan kesimpulan kedua bahwa transformasi konflik terhadap kondisi yang terjadi selama program lawatan dapat dilaksanakan dengan membangun kesepakatan bersama serta membentuk ketentuan antar aparatur gampong dan masyarakat, terutama dalam pelaksanaan kegiatan olah raga dan kesenian. Selanjutnya, dapat disampaikan sejumlah saran kepada masyarakat, aparatur gampong dan Pemerintah Kabupaten. Berharap agar masyarakat selalu berupaya meningkatkan kebersamaan antar masyarakat serta dapat memaksimalkan program lawatan sebagai wadah membangun silaturahmi antar masyarakat dan gampong.

Program lawatan hendaknya dapat dijadikan sebagai sarana konsolidasi dan sinergi antar masyarakat. Para pelaksana juga hendaknya menyadari bahwa berbagai kegiatan yang dilaksanakan selama program lawatan bertujuan untuk membina silaturahmi dan keharmonisan antar masyarakat gampong. Selain itu, program lawatan juga dapat dijadikan sebagai agenda untuk menyalurkan berbagai kreativitas masyarakat terutama dalam hal budaya, olah raga dan kesenian.

Berikutnya, kepada aparatur gampong diharapkan untuk membentuk kesepakatan dan ketentuan agar konflik dapat dihindari, baik sebelum, saat pelaksanaan kegiatan maupun pasca kegiatan. Pengaturan lebih rinci dan ketat terutama berkaitan dengan pemicu konflik dalam pelaksanaan kegiatan olah raga dan kesenian. Misalnya saja terkait larangan saling sindir antar pendukung serta pembatasan waktu kegiatan kesenian malam.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Simeulue agar terus mendukung pelaksanaan program lawatan mengingat kegiatan ini sudah menjadi tradisi dalam masyarakat. Namun, untuk menghindari sejumlah peristiwa konflik maka Pemerintah Kabupaten Simeulue sangat diharapkan untuk terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan. Jika diperlukan, termasuk memberikan sanksi terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, K. (2009). Pengantar. In T. Prihatono, & et. al, *Post Conflict Peacebuilding: Naskah Akademik untuk Penyusunan Manual*. Jakarta: ProPatria Institute.
- Bank, W. (2006). *Civil Society and Peacebuilding Potential, Limitations and Critical Factors, Report No. 36445-GLB*. Washington D.C: Social Development Departement, World Bank.
- Bariah, N. (2018). *Fenomena Konflik Politik di Gampong Suak Keumudei Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat*. Meulaboh: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
- Fisher, S., & dkk. (2000). *Manajemen Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: British Council.
- Lederach, J. P. (2003). *The Little Book of Conflict Transformation*. Intercourse: Good Books.
- Martono, N. (2015). *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Masyitah, A. (2018). *Resolusi Konflik Oleh Lembaga Sosial (Tuha Peut) di Gampong Meunasab Krueng Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya*. Meulaboh: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Susan, N. (2009). *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer Cetakan ke-1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Susan, N. (2010). *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer Edisi Pertama, Cetakan ke-2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tjoetra, A. (2016). Transformasi Organisasi Masyarakat Sipil Aceh Pasca MoU Helsinki. *Community Pengawas Dinamika Ssosial Volume 2, Nomor 3, Oktober 2016*, 270-285.
- Yusnidar. (2016). *Konflik Sosial Rawa Tripa di Gampong Tripa Bawah Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya*. Meulaboh: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.